



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMISKINAN DI KECAMATAN JEKULO DAN
MEJOBO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2013**

Reza Attabiurrobbi Annur[✉]

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel	Abstrak
<i>Sejarah Artikel:</i> Diterima Oktober 2013 Disetujui November 2013 Dipublikasikan November 2013	Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama dinegara berkembang seperti Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengidentifikasi perbedaan kondisi sosial ekonomi dan menganalisis faktor-faktor yang membedakan penurunan tingkat kemiskinan penduduk di kecamatan Jekulo dan Mejobo. Pendekatan yang digunakan analisis deskriptif. Lokasi yang dipilih yaitu kecamatan Jekulo dan Mejobo. Sumber data sekunder dari BPS berupa jekulo dalam angka Mejobo dalam angka. Metode Pengumpulan data menggunakan deskriptif persentase. Variabel penelitian ini menggunakan faktor-faktor penyebab kemiskinan. Faktor penyebab utama penduduk miskin sebagai berikut; kondisi geografis, potensi ekonomi, tingkat pendidikan, dan mata pencarian. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang membedakan tingkat kemiskinan di kecamatan Jekulo dan Mejobo berbeda adalah kondisi geografis; luas wilayah kecamatan Jekulo lebih besar dan letaknya lebih strategis di jalur Pantura; potensi ekonomi di kecamatan Jekulo lebih baik karena didukung adanya industry sektor usaha besar; kondisi rumah tangga miskin di kecamatan Jekulo lebih rendah; lamanya pendidikan yang ditempuh penduduk kecamatan Jekulo lebih lama; mata pencarian penduduk kecamatan Jekulo sebagian besar sebagai karyawan swasta dan pedagang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada perbedaan tingkat kemiskinan antara kecamatan Jekulo dan Mejobo.
<i>Keywords:</i> <i>Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan, Factors Affecting Poverty</i>	Saran disampaikan kepada pemerintah daerah untuk memperbanyak lapangan pekerjaan formal dan sektor bukan pertanian bersifat padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dari rumah tangga miskin, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka, menurunkan biaya pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi, meningkatkan program KB dan program catur warga, serta memperbaiki infrastruktur yang telah rusak seperti jalan di wilayah-wilayah terpencil agar dapat memasarkan hasil produksi ke kota
<i>Abstract</i>	
<p><i>Poverty is a problem faced by all countries, especially developing countries like Indonesia. The goal is to identify differences in socio-economic conditions and to analyze the factors that differentiate the population in poverty reduction and Mejobo Jekulo districts.</i></p> <p><i>The approach used descriptive analysis. The location was chosen, namely districts Jekulo and Mejobo. Secondary data sources in the form of BPS Jekulo in numbers Mejobo in numbers. Data collection methods using descriptive percentages. This study uses the variable factors that cause poverty. The main factors causing the poor as follows; geographical conditions, economic potential, level of education, and livelihood.</i></p> <p><i>The results showed that the factors differentiating the poverty level in the district is Jekulo and Mejobo different geographical conditions; Jekulo area districts are larger and more strategically located on the northern coast lines; economic potential in the district Jekulo better because it supported the existence of a large industrial sector; conditions poor households in the district Jekulo lower; ever pursued education districts Jekulo older</i></p>	

population; livelihoods Jekulo districts mostly as private employees and vendors. The conclusion of this study is no difference between the poverty level and Mejobo Jekulo districts.

Suggestions submitted to the local government to increase formal employment and agriculture sectors are not labor intensive able to absorb labor from poor households, so as to increase their income, lowering the cost of education up to college level, improve program planning and community chess programs, as well as repairing damaged infrastructure such as roads in remote areas in order to market their products to the city.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi: ISSN 2252-6889
Kampus Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang
Telp/Fax: (024) 8508015, email: Reza_abe@yahoo.com

PENDAHULUAN

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut *World Bank* (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Kemiskinan disebut sebagai masalah sosial, dan bahkan merupakan masalah sosial yang paling rumit dan sulit, karena kemiskinan mendatangkan berbagai gangguan terhadap kehidupan bermasyarakat. Ini tampak jelas dari fakta-fakta bahwa sebagian besar kejahatan terkait baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kemiskinan. Kasus-kasus seperti pencurian dan perampokan, misalnya, terkait langsung dengan kemiskinan, sedangkan kasus-kasus seperti pengangguran dan kondisi kesehatan yang buruk dengan segala konsekuensinya terkait secara tidak langsung dengan kemiskinan, karena masyarakat miskin tidak mampu mendapatkan pendidikan yang memadai dan makanan yang bergizi.

Masalah kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah, dan upaya pengentasan kemiskinan adalah salah satu aspek penting mencapai kesejahteraan rakyat. Rumah tangga miskin umumnya bertempat tinggal di pedesaan dan mereka memiliki kegiatan di sektor pertanian dan kegiatan lain yang berhubungan dengan sektor tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya setiap kebijakan untuk mengentaskan

kemiskinan harus diarahkan langsung pada pengembangan desa pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya

Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi.

Kemampuan setiap daerah untuk membangun daerahnya masing-masing berbeda, karena dipengaruhi oleh adanya perbedaan potensi sumber daya yang dimilikinya seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sumber daya sosial. Dalam proses pembangunan ada daerah yang melimpah sumber daya alam tetapi kurang dalam sumber daya manusia, namun ada daerah yang sebaliknya kurang dalam hal sumber daya alam tapi melimpah dalam sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Keadaan ini selanjutnya menyebabkan perbedaan dalam perkembangan pembangunan yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan di masing-masing daerah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin di wilayah kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus, yaitu seberapa besar jumlah pengangguran yang ada di wilayah tersebut. Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Selain itu adanya industri yang bangkrut sehingga harus merumahkan tenaga kerjanya. Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut seperti, potensi ekonomi, tingkat pendidikan, dan potensi industri.

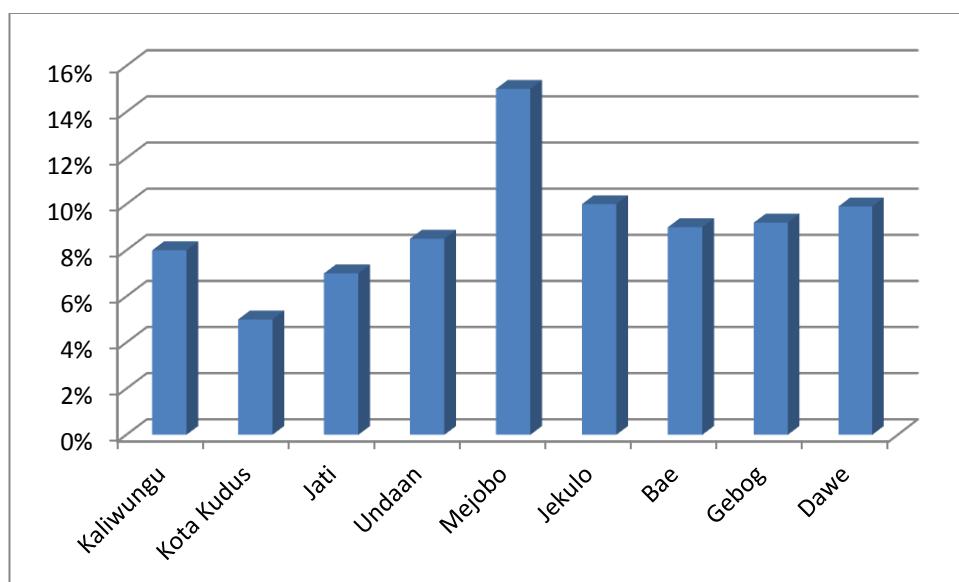
Dipilihnya wilayah kecamatan Jekulo dan Mejobo sebagai objek dari penelitian ini, karena di wilayah tersebut terjadi perbedaan tingkat kemiskinan yang mencolok, padahal

kedua wilayah tersebut saling berbatasan dan tidak terlalu jauh dengan ibukota kabupaten kedua wilayah kecamatan tersebut jaraknya Kudus.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kudus Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	%
1	Kaliwungu	93.167	11.646	8%
2	Kota Kudus	92.262	18.452	5%
3	Jati	102.166	14.595	7%
4	Undaan	70.481	8.292	8,5%
5	Mejobo	71.665	4.778	15%
6	Jekulo	101.083	10.108	10%
7	Bae	67.674	7.519	9%
8	Gebog	90.651	9.853	9,2%
9	Dawe	97.232	9.821	9,9%

Sumber: Kudus Dalam Angka 2102



Gambar 2 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kompetensi dasar Tahun 2012

Rumah Tangga Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013”

Dari tabel 1 dan gambar 2di atas tampak bahwa jumlah penduduk miskin di kecamatan Jekulo dan Mejobo lebih tinggi dibandingkan wilayah kecamatan lainnya di kabupaten Kudus.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan

Tinjauan Pustaka

Pengertian Kemiskinan

Menurut Suparlan (1984) kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang

bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang terolong sebagai orang miskin.

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Dermoredjo, 2003).

Menurut Sumedi dan Supadi (2004) masyarakat miskin mempunyai beberapa ciri sebagai berikut 1) tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka, 2) tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada, 3) rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan, 4) terperangkap dalam rendahnya budaya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme, 5) rendahnya pemilikan aset fisik termasuk asset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.

Indikator Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 7.057 per orang per

hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari. Ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (*consumption based poverty line*). Oleh sebab itu, menurut Kuncoro (1997) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu: (1) Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya. (2) Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Hartomo dan Aziz (1997) mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu: 1) Mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal maupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki sendiri sedikit sekali sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas. 2) Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan maupun modal usaha, sedangkan syarat tidak terpenuhi untuk memperoleh kredit perbankan seperti adanya jaminan kredit dan lain-lain, sehingga mereka yang perlu kredit terpaksa berpaling kepada "lintah darat" yang biasanya meminta syarat yang berat dan memungut biaya yang tinggi. 3) Tingkat pendidikan mereka yang

rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka habis tersisa untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa lagi untuk belajar. Anak-anak mereka tidak dapat menyelesaikan sekolah, karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan atau menjaga adik-adik di rumah, sehingga secara turun-temurun mereka terjerat dalam keterbelakangan garis kemiskinan. 4) Kebanyakan mereka tinggal di perdesaan. Banyak diantara mereka tidak memiliki tanah, walaupun ada kecil sekali. Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar petani, karena pertanian bekerja dengan musiman maka kesinambungan kerja kurang terjamin. Banyak diantara mereka kemudian bekerja sebagai "pekerja bebas", berusaha apa saja. Dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang besar maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka dibawah garis kemiskinan, di dorong dengan kesulitan hidup di desa maka banyak diantara mereka mencoba berusaha di kota. 5) Kebanyakan diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan, sedangkan kota dibanyak negara sedang berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa. Apabila di negara-negara maju pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka urbanisasi di negara berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga dalam perkembangan industri. Bahkan, sebaliknya perkembangan teknologi di kota justru menarik pekerjaan lebih banyak tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota dalam kantong-kantong kemelaratan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin mempunyai beberapa ciri sebagai berikut 1) tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka, 2) tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada, 3) rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan, 4) terperangkap dalam rendahnya budaya kualitas

SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme, 5) rendahnya pemilikan aset fisik termasuk asset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.

Jenis-jenis Kemiskinan

Menurut Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Menurut Sumodiningrat (1999) klasifikasi kemiskinan ada lima kelas, yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan structural, kemiskinan kronis, dan kemiskinan sementara.

Kemiskinan absolut selain dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak, juga ditentukan oleh tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan. Sekelompok orang dalam masyarakat dikatakan mengalami kemiskinan relatif apabila pendapatannya lebih rendah dibandingkan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka masuk dalam kategori miskin absolut atau tidak. Kemiskinan struktural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Kemiskinan

kronis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumberdaya dan keterisolasi (daerah-daerah yang kritis akan sumberdaya alam dan daerah terpencil), rendahnya derajat pendidikan dan perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar. Sedangkan Kemiskinan sementara terjadi akibat adanya: Perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, Perubahan yang bersifat musiman, dan Bencana alam atau dampak dari suatu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz (1997) yaitu: pendidikan yang terlalu rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, beban keluarga.

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan

keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Menurut Sharp (dalam Kuncoro, 2006) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia seperti tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang rendah, distribusi pendapatan yang timpang, kesempatan kerja yang kurang, kualitas sumberdaya alam masih rendah, penggunaan teknologi masih kurang, etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah, kultur/budaya (tradisi), dan politik yang belum stabil. Kesemua faktor tersebut di atas saling mempengaruhi, dan sulit memastikan penyebab kemiskinan yang paling utama atau faktor mana yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Kesemua faktor tersebut merupakan *viciois circle* (lingkaran setan) dalam masalah timbulnya kemiskinan (Tulus, 1997).

Upaya Pemerintah Mengentaskan Kemiskinan

Pemerintah telah mempersiapkan beberapa program prioritas penanggulangan kemiskinan dalam tahun 2007 didukung oleh

beberapa program prioritas lain, antara lain: 1) Memberdayakan kelompok miskin yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin dengan meningkatkan etos kerja, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, perbaikan konsumsi dan peningkatan gizi, serta perbaikan kemampuan dalam penguasaan IPTEK. 2) Menerapkan kebijakan ekonomi moral yaitu pengembangan sistem ekonomi moral sangat diperlukan sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi harus adil, sehingga dibutuhkan keadilan ekonomi yang bersumber pada Pancasila bukan pada ekonomi modern yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. 3) Melakukan pemetaan kemiskinan yaitu langkah awal dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu mengenali karakteristik dari penduduk yang miskin sehingga diperlukan pemetaan kemiskinan yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan persoalan yang mereka alami. 4) Melakukan program pembangunan wilayah seperti Inpres dan transmigrasi serta memberikan pelayanan perkreditan melalui lembaga perkreditan pedesaan seperti BKD dan KCK – KUD.

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Bappeda Jateng (2007), upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui lima pilar yang disebut "*Grand Strategy*", meliputi; 1) Perluasan kesempatan kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. 2) Pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat dan memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar. 3) Peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan

berusahamasyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. 4) Perlindungan sosial, dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial. 5) Kemitraan regional, dilakukan untuk pengembangan dan menata ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional, dan internasional guna mendukung pelaksanaan ke empat strategi diatas.

Baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Kerangka Berpikir

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan tidak terpenuhinya kebutuhan secara menyeluruh. Individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan dapat digolongkan pada kelompok orang-orang miskin.

Penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan merupakan masalah pokok dalam pembangunan nasional. Perencanaan dan implementasi dari kebijakan maupun program penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan haruslah memahami sifat dan dinamika kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan agar sasaran kebijakan dan program tersebut dapat dicapai dengan efisien.

Masyarakat miskin umumnya bertempat tinggal di pedesaan dan mereka sebagian besar memiliki kegiatan di sektor pertanian dan kegiatan lain yang berhubungan dengan sektor itu. Oleh karena itu sebenarnya kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan harus diarahkan langsung pada pembangunan desa terutama di sektor pertanian.

Dalam mengkaji masalah kemiskinan beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat berada pada kemiskinan, dan dampak yang ditimbulkan kemiskinan terhadap kehidupan masyarakat. Berbagai akibat dari adanya kemiskinan akan berpengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat. Kemiskinan akan menurunkan kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk bekerja dan berkreasi dengan baik. Kemiskinan akan menurunkan kemampuan masyarakat mencapai derajat kesehatan yang memadai.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Suatu penelitian akan memperoleh keberhasilan apabila didasari suatu perencanaan yang matang. Dalam penelitian ini peneliti memilih studi hasil kajian pustaka. Sumber pustaka sebagai kajian dalam penelitian ini adalah data dari BPS (Biro Pusat Statistik) berupa Jekulo dalam Angka dan Mejobo dalam Angka. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain (Hadi, 1991).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten

Kudus, yang akan dilaksanakan pada Agustus sampai dengan September 2013. Pemilihan lokasi dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan kawasan yang masyarakatnya sebagian besar mata pencaharinya sebagai petani.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan faktor-faktor penyebab kemiskinan. Faktor penyebab utama penduduk miskin sebagai berikut; kondisi geografis, potensi ekonomi, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan diambil dari data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui literatur dari berbagai instansi seperti Biro Pusat Statistik, Buku Potensi Desa, Kelurahan dan Kecamatan dan penelitian dari laporan terdahulu, dan melalui studi pustaka.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah menggunakan dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melihat, mencatat, menganalisa dan mengevaluasi data sekunder yang diperoleh dari kantor BPS Kabupaten Kudus berupa Kudus dalam Angka yang meliputi kondisi geografis, potensi ekonomi, dan kependudukan di kecamatan Jekulo dan Mejobo

Metode Analisis

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif persentase dengan tabulasi silang dan statistik deskriptif, yang dikumpulkan dari hasil telaah pustaka. Data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat menjawab fenomena yang ada yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini. Untuk membantu analisis deskriptif tersebut digunakan tabulasi data dan persentase.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis Kecamatan Jekulo dan Mejobo

Tabel 3 Kondisi Geografis di Kecamatan Jekulo dan Mejobo

No	Kondisi Geografis	Kecamatan Jekulo		Kecamatan Mejobo	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tanah Sawah	4.274.417	52%	4.698.800	60%
2	Tanah Kering	2.489.384	30%	2.698.800	34%
3	Tanah Hutan Produksi	809.185	10%	-	0%
4	Tanah Perkebunan	6.500	0,1%	3.250	0,04%
5	Tanah Fasilitas Umum	30.360	0,4%	25.455	0,32%
6	Lain-lain	621.228	8%	433.210	6%
	Jumlah	8.231.074	100%	7.859.515	100%

Sumber: Data Penelitian yang Diolah Tahun 2013

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa luas wilayah kecamatan Jekulo lebih besar dibandingkan luas wilayah kecamatan Mejobo. Dari luas tanah sawah dan tanah kering wilayah kecamatan Mejobo lebih besar memanfaatkan sebagai lahan pertanian dibandingkan di wilayah kecamatan Jekulo. Hal ini karena wilayah kecamatan Jekulo ada yang merupakan pegunungan seperti desa Tanjungrejo, Honggosoco, dan Terban sehingga tidak bisa dibuat areal persawahan melainkan sebagai hutan produksi (kayu jati). Tanah perkebunan di wilayah kecamatan Jekulo lebih luas dibandingkan di kecamatan Mejobo. Tanah fasilitas umum di kecamatan Jekulo juga lebih luas karena wilayah kecamatan Jekulo berada di jalan Pantura sehingga fasilitas umum lebih banyak dibandingkan di kecamatan Mejobo. Sedangkan yang termasuk lahan lain-lain adalah berupa jalan, sungai dan rawa-rawa.

Dari kondisi kondisi geografis pada masing-masing wilayah kecamatan Jekulo

maupun kecamatan Mejobo dapat diketahui bahwa wilayah kecamatan Jekulo lebih luas daripada wilayah kecamatan Mejobo. Letak kecamatan Jekulo juga lebih strategis karena berada di jalur Pantura yang merupakan jalur utama bagi transportasi: industri, perdagangan, pariwisata, barang dan jasa serta produk pertanian dari kota-kota besar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Ibu Kota dibandingkan dengan letak kecamatan Mejobo yang terletak di sebelah selatan jalur Pantura.

Berdasarkan hasil perolehan data tentang kondisi geografis masing-masing wilayah kecamatan, menunjukkan wilayah kecamatan Jekulo lebih baik dibandingkan dengan wilayah kecamatan Mejobo, sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan pada wilayah tersebut, yaitu wilayah kecamatan Mejobo tingkat kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan kecamatan Jekulo.

Potensi Ekonomi Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Mejobo

Tabel 4 Potensi Ekonomi di Kecamatan Jekulo dan Mejobo

No	Potensi Perekonomian	Produk Andalan Kecamatan Jekulo	Produk Andalan Kecamatan Mejobo
1	Pertanian Tanaman Pangan	Padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, kacangm hijau, kedelai, mangga, rambutan, durian, pepaya,	Padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, mangga, rambutan,

		duku petai	pepaya, duku
2	Perkebunan	Tebu, Kelapa, Kapuk	Tebu, kelapa
3	Peternakan	Sapi perah, Sapi potong, Kambing, Itik, Ayam kampung, dan ayam potong	Sapi potong, kambing, itik, ayam kampung, ayam potong
4	Perikanan	Lele dumbo, ikan kolam	Lele dumbo dan ikan kolam
5	Industri Sektor Usaha Kecil	Makanan ringan, mebelair, kerajinan besi, kerajinan bambu, konveksi, kerajinan tas, tahu, tempe	Kerajinan bambu, kerajinan besi, kerajinan batu bata, industri cakar ayam, kerajinan tas, kecap, tahu, tempe, cincau, jenang, dan makanan ringan
6	Industri Sektor Usaha Besar	Rokok (Djarum Kudus), Kertas (PT.Pura Nusa Persada, PT. Enggal Subur Kertas, Industri pengolahan plastik dan karung (PT.Solo Roda), Industri pengolahan kayu (PT Kudus Karya Prima)	-
7	Wisata	Situs Pati Ayam berupa fosil purbakala	Tradisi lomban, kesenian barongan

Sumber: Data Penelitian yang Diolah Tahun 2013

Berdasarkan hasil perolehan data tentang potensi ekonomi masing-masing wilayah kecamatan, sektor pertanian masih cukup dominan dan mempunyai andil besar dalam menopang perekonomian penduduk. Perbedaannya adalah pada sektor industri, pada wilayah kecamatan Jekulo sektor industri besar telah berkembang lebih maju dibandingkan di wilayah kecamatan Mejobo.

Keberadaan banyaknya industri besar di wilayah kecamatan Jekulo memberikan pengaruh yang baik dalam penyerapan tenaga kerja dan partisipasi dalam pembangunan, serta yang paling penting adalah membuktikan bahwa

wilayah Kecamatan Jekulo sangat menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Dari kondisi perekonomian tersebut maka dapat dapat disimpulkan bahwa tingkat perekonomian di wilayah kecamatan Jekulo lebih baik dibandingkan wilayah kecamatan Mejobo, sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan pada wilayah tersebut, yaitu wilayah kecamatan Mejobo tingkat kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan kecamatan Jekulo.

Kependudukan Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Jekulo

Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Rumah Tangga Miskin, Tingkat Pendidikan, dan Mata Pengaharian di Kecamatan Jekulo dan Mejobo

No	Kependudukan	Kecamatan Jekulo	Kecamatan Mejobo	Selisih Perbedaan
1	Rumah tangga miskin	7%	12%	5%
2	Lamanya penduduk menempuh pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi	429.629 tahun	389.330 tahun	40.299 tahun

Mata Pencaharian			
- Petani	11%	11%	-
- Buruh tani	12%	13%	1%
- Pengusaha	1,8%	0,8%	1%
- Buruh tani	20%	37%	17%
- Buruh bangunan	11%	9%	2%
- Pedagang	14%	3%	11%
- Pengangkutan	6%	2%	4%
- PNS/TNI Polri	3%	4%	1%
- Pensiunan	3%	0,7%	2%
- Lain-lain	16%	19%	3%

Sumber: Data Penelitian yang Diolah Tahun 2013

Berdasarkan data-data kependudukan tentang jumlah kepala keluarga miskin dari kedua wilayah kecamatan menunjukkan bahwa kecamatan Jekulo tingkat kemiskinan keluarga adalah 7%, sedangkan di wilayah kecamatan Mejobo 12%. Hal ini membuktikan bahwa wilayah kecamatan Mejobo lebih miskin dibandingkan di wilayah kecamatan Jekulo. Data-data tentang kepadatan penduduk di kedua wilayah kecamatan adalah sama yaitu 1.723 jiwa/km.

Dalam UU Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, tingkatan pendidikan digolongkan dalam kategori rendah (tidak sekolah sampai tamat SLTP) kategori sedang (Tamat SMA/sederajat), kategori tinggi (Tamat Perguruan Tinggi). Dari pernyataan tersebut penduduk di wilayah kecamatan Jekulo yang jenjang pendidikan yang ditempuh dari SD sampai perguruan tinggi 429.629 tahun lebih lama 40.299 tahun dibandingkan dengan penduduk di wilayah kecamatan Mejobo. Hal ini terjadi karena ketika individu tersebut berada pada usia sekolah kesadaran tentang pentingnya pendidikan masih tergolong rendah sehingga anak-anak usia sekolah hanya di sekolah sampai jenjang SD selain itu perekonomian tergolong cukup sulit sehingga tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah. Ini berarti semakin banyak penduduk dengan pendidikan rendah akan semakin besar peluang rumah tangga tersebut berada dalam kemiskinan. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung

tidak memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang lebih.

Berdasarkan data-data tingkat pendidikan di wilayah kecamatan Jekulo dan wilayah kecamatan Mejobo menunjukkan bahwa wilayah kecamatan Jekulo yang berpendidikan rendah lebih sedikit dibandingkan di wilayah kecamatan Mejobo, demikian pula pada tingkat pendidikan dalam kategori sedang dan tinggi di wilayah kecamatan Jekulo lebih tinggi dibandingkan di wilayah kecamatan Mejobo.

Ditinjau berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat diketahui persentase mata pencaharian penduduk di kecamatan Jekulo; Petani Sendiri 11%, Buruh Tani 12%, Pengusaha 1,8%, Buruh Industri 20%, Buruh Bangunan 11%, Pedagang 14%, Pengangkutan 6%, PNS, TNI.Polri 3%, Pensiunan 3% dan Lain-lain 16%. Sedang di wilayah kecamatan Mejobo. Petani Sendiri 11%, Buruh Tani 13%, Pengusaha 0,8%, Buruh Industri 37%, Buruh Bangunan 9%, Pedagang 3%, Pengangkutan 2%, PNS, TNI.Polri 4%, Pensiunan 0,7% dan Lain-lain 19%. Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa tingkat mata pencaharian di wilayah kecamatan Mejobo sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sendiri, buruh tani, buruh industri dan buruh bangunan, pekerjaan lain ada namun persentasenya kecil bila dibandingkan dengan penduduk di wilayah kecamatan Jekulo.

Berdasarkan data-data kependudukan tersebut di atas maka dapat dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan penduduk di wilayah kecamatan Mejobo lebih tinggi dari kecamatan Jekulo, tingkat pendidikan di wilayah Jekulo lebih tinggi daripada kecamatan Mejobo, sebagian besar penduduk di kecamatan Mejobo

sebagai buruh tani, buruh industri dan buruh bangunan.

Berdasarkan data-data tersebut di atas maka dapat peneliti paparkan tentang potensi-potensi yang ada di masing-masing wilayah sebagai berikut.

Tabel 6 Potensi-Potensi di Kecamatan Jekulo dan Mejobo

No	Potensi di Kecamatan Jekulo	Potensi di Kecamatan Mejobo	Keterangan
1	Kondisi Geografis <ul style="list-style-type: none"> - Luas wilayah 8.231.074 ha - Letaknya strategis di jalur pantura sebagai jalur utama transportasi industri, perdagangan, pariwisata, barang dan jasa 	Kondisi Geografis <ul style="list-style-type: none"> - Luas wilayah 7.859.515 ha - Letaknya di daerah pinggiran 	<ul style="list-style-type: none"> - Luas wilayah kecamatan Jekulo lebih besar dari Mejobo - Letak wilayah kecamatan Jekulo lebih strategis dari Mejobo
2	Potensi Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> - Meliputi Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri sektor usaha kecil, wisata dan Industri sektor usaha besar 	Potensi Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> - Hanya meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri sektor usaha kecil, wisata tidak memiliki industri sektor usaha besar 	Potensi ekonomi kecamatan Jekulo lebih baik karena didukung adanya industri sektor usaha besar
3	Demografi Jumlah rumah tangga 37.97, rumah tangga miskin 2.818 (7%)	Demografi Jumlah rumah tangga 21.792, rumah tangga miskin 2.641 (12%)	Kondisi rumah tangga miskin di kecamatan Jekulo lebih rendah dari Mejobo
4	Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan rendah 60% - Pendidikan sedang 27% - Pendidikan tinggi 13% 	Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan rendah 76% - Pendidikan sedang 20% - Pendidikan tinggi 4% 	Lamanya pendidikan yang ditempuh penduduk kecamatan Jekulo lebih lama dari Mejobo
5	Mata Pencaharian <ul style="list-style-type: none"> - Petani dan buruh 54% - Selain petani dan buruh 45% 	Mata Pencaharian <ul style="list-style-type: none"> - Petani dan buruh 70% - Selain petani dan buruh 30% 	<ul style="list-style-type: none"> - Mata pencaharian sebagai petani dan buruh di kecamatan Jekulo lebih rendah dari Mejobo

			- Mata pencaharian di luar petani dan buruh penduduk kecamatan Jekulo lebih besar dari Mejobo
--	--	--	---

Sumber: Data Penelitian yang Diolah Tahun 2013

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa penduduk di wilayah kecamatan Jekulo potensinya lebih baik dibandingkan di wilayah Mejobo. Hal ini juga mempengaruhi tingkat kemiskinan masing-masing daerah yaitu wilayah kecamatan Jekulo lebih rendah tingkat kemiskinannya dibandingkan di wilayah Mejobo.

Pembahasan

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kecamatan Jekulo dan Mejobo yaitu, kondisi geografis, potensi ekonomi dan kependudukan (tingkat pendidikan dan pekerjaan).

Kondisi Geografis

Berdasarkan hasil perolehan data tentang kondisi geografis masing-masing wilayah kecamatan, menunjukkan wilayah kecamatan Jekulo lebih baik dibandingkan dengan wilayah kecamatan Mejobo, sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan pada wilayah tersebut, yaitu wilayah kecamatan Mejobo tingkat kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan kecamatan Jekulo. Karena letaknya strategis di jalur pantura sebagai jalur utama transportasi industri, perdagangan, pariwisata, barang dan jasa, maka di wilayah kecamatan Jekulo mendorong tumbuhnya industri kecil, menengah dan dalam skala besar, sehingga industrialisasi ini akan menyerap tenaga kerja pada masyarakat di wilayah kecamatan Jekulo.

Hal tersebut didukung Sumardi & Ever (1990), faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah sesuatu yang kompleks mulai dari faktor sumberdaya manusianya, kondisi alam dan geografis, kondisi sosial-budaya, sampai kepada sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan

timpang atau tidak merataanya distribusi pendapatan. Kerap kali faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan tumpang tindih satu sama lain. Faktor-faktor rendahnya mutu sumberdaya manusia, kondisi alam dan geografis, serta kondisi sosial-budaya berkaitan dengan tingkat keterbelakangan (*underdevelopment*) suatu masyarakat yang pada dasarnya dapat diperbaiki. Namun ada pula faktor kondisi alam dan geografis yang tidak dapat lagi tertanggulangi sehingga menyebabkan Kemiskinan Absolut yang menetap sifatnya. Tapi banyak ahli yang lebih meyakini bahwa faktor dominan penyebab kemiskinan adalah ketidakadilan ekonomi, sosial ataupun politik yang mengakibatkan apa yang disebut Kemiskinan Struktural (*Structural Poverty*), baik pada tatanan negara maupun internasional.

Daerah pinggiran kota mempunyai posisi yang unik. Biasanya basis perekonomiannya merupakan campuran antara pertanian berskala kecil, industri berskala kecil atau industri rumah tangga, perdagangan berskala kecil, pekerja atau buruh industri, serta mereka yang terproletarianisasi dan termarjinalisasi. Masyarakatnya dapat dikategorikan berpenghasilan menengah ke bawah yang rentan perekonomiannya dan potesial untuk menjadi miskin (Mongid, 1999).

Potensi ekonomi

Berdasarkan hasil perolehan data tentang potensi ekonomi masing-masing wilayah kecamatan, sektor pertanian masih cukup dominan dan mempunyai andil besar dalam menopang perekonomian penduduk. Perbedaannya adalah pada sektor industri, pada wilayah kecamatan Jekulo sektor industri besar telah berkembang lebih maju dibandingkan di wilayah kecamatan Mejobo.

Keberadaan banyaknya industri besar di wilayah kecamatan Jekulo memberikan pengaruh yang baik dalam penyerapan tenaga kerja dan partisipasi dalam pembangunan, serta yang paling penting adalah membuktikan bahwa wilayah Kecamatan Jekulo sangat menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Dari kondisi perekonomian tersebut maka dapat dapat disimpulkan bahwa tingkat perekonomian di wilayah kecamatan Jekulo lebih baik dibandingkan wilayah kecamatan Mejobo, sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan pada wilayah tersebut, yaitu wilayah kecamatan Mejobo tingkat kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan kecamatan Jekulo.

Hal ini didukung Soepono (1995) bahwa penduduk pedesaan Jawa Tengah lebih banyak tertuju pada sektor primer, sehingga lebih banyak kegiatan mengolah tanah untuk kegiatan pertanian. Sementara produksi alam lainnya belum banyak dimanfaatkan, kondisi ini menyebabkan besarnya ketergantungan masyarakat kepada keadaan alam. Suatu desa memiliki tanah yang subur dengan pengairan yang lebih, maka dapat dipastikan kalau secara ekonomi penduduk desa itu ekonominya lebih baik. Sebaliknya apabila lingkungan alamnya kurang menunjang, pertaniannya kurang subur, maka ekonomi penduduk desa dapat dipastikan sebagian masyarakat desa masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Siagian (1974) penyebab dari permasalahan (kemiskinan) adalah kondisi alam desa dan manusianya sendiri. Secara geografis kondisi suatu desa, tanahnya subur tetapi belum diolah secara maksimal karena penduduknya yang jarang dan berpindah-pindah. Ada juga suatu desa yang kurang subur tetapi penduduknya padat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan.

Pembukaan lokasi industri kecil, menengah dan berskala besar di wilayah kecamatan Jekulo, sehingga industrialisasi ini akan menyerap tenaga kerja di wilayah kecamatan Jekulo. Terserapnya tenaga kerja yang semula sebagai buruh tani dari desa ke industri kecil, menengah dan berskala besar merupakan pemecahan masalah pembangunan

desa. Kurangnya jumlah areal pertanian diantara tuan tanah dan petani merupakan biang keladi dari penderitaan para petani di desa. Merealisasi pembangunan pertanian yang industrial dan produktif, digariskan suatu kebijaksanaan agar pemerintah menetapkan harga patokan padi dan beras sesui dengan harga dalam pasar internasional. Selain itu perlu dibuka industri kerajinan dan industri lainnya.

Kependudukan

Tingkat Pendidikan Formal Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab kemiskinan di desa Sadang Kecamatan Jekulo dan desa Kirig Kecamatan Mejobo adalah tingkat pendidikan yang rendah mayoritas tidak tamat SD dan hanya lulus SD. Ini berarti semakin banyak masyarakat dengan pendidikan rendah yaitu tidak tamat SD dan hanya tamat SD akan semakin besar peluang rumah tangga tersebut dalam kemiskinan. Individu dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang lebih sehingga untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan akan sangat sulit dilakukan.

Penelitian ini sesuai dengan pendapat Hartomo dan Aziz (1997) salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

Menurut Elhorst (2003) dalam beberapa studi bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Hal ini disebabkan karena berbagai alasan berikut: Pertama, seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung mencari pekerjaan lebih intensif. Kedua, mereka kurang rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menunjukkan pola yang lebih stabil dibandingkan yang kurang berpendidikan. Ketiga, seseorang yang berpendidikan tinggi biasanya memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perekonomian dengan tingkat teknologi yang terus berkembang.

Hakikat pendidikan adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian baik di dalam maupun di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan saah satu indikator yang sangat penting untuk mengetahui sumber daya manusia. Masalah mendasar dalam bidang pendidikan antara lain adalah putus sekolah yang tinggi dan kualitas pendidikan yang belum dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang semakin kompetitif.

Hasil penelitian juga diperkuat dari hasil penelitian Ustama (2009) yang berjudul Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan. Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan pendidikan yang terprogram baik dan menjangkau semua (*education for all*) seperti target MDGs dengan kualitas tertentu maka pendidikan menjadi instrument paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan.

Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dari menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dengan demikian pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusi sosial, untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Jenis Pekerjaan Masyarakat

Dalam penelitian ini faktor yang menyebabkan rumah tangga miskin di desa Sadang Kecamatan Jekulo dan desa Kirig Kecamatan Mejobo adalah faktor pekerjaan, yaitu mayoritas petani dan buruh. Ini berarti semakin banyak kepala rumah tangga yang bekerja sebagai petani dan buruh, semakin besar peluang rumah tangga tersebut dalam kemiskinan.

Pernyataan ini sesuai pendapat Hartomo dan Aizz (1997) bahwa rumah tangga miskin kebanyakan mereka tinggal di perdesaan. Banyak diantara mereka tidak memiliki tanah, walaupun ada kecil sekali. Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar petani, karena pertanian bekerja dengan musiman maka

kesinambungan kerja kurang terjamin. Banyak diantara mereka kemudian bekerja sebagai "pekerja bebas", berusaha apa saja. Dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang besar maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka dibawah garis kemiskinan, di dorong dengan kesulitan hidup di desa maka banyak diantara mereka mencoba berusaha di kota.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil peneliti dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang membedakan kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus sebagai berikut. 1) Kondisi geografis di kecamatan Jekulo lebih strategis karena berada di jalur utama Pantura sehingga dapat mengakomodir adanya transportasi industri, perdagangan, pariwisata, barang dan jasa serta mendorong tumbuhnya industri kecil, menengah dan dalam skala besar. Sedangkan di wilayah kecamatan Mejobo yang terletak di daerah pinggiran biasanya basis perekonomiannya merupakan campuran antara pertanian berskala kecil, industri berskala kecil atau industri rumah tangga, perdagangan berskala kecil, pekerja atau buruh industri, serta mereka yang terproletarianisasi dan termarjinalisasi, masyarakatnya dapat dikategorikan berpenghasilan menengah ke bawah yang rentan perekonomiannya dan potesial untuk menjadi miskin. 2) Potensi ekonomi masing-masing wilayah kecamatan, sektor pertanian masih cukup dominan dan mempunyai andil besar dalam menopang perekonomian penduduk. Perbedaannya adalah pada sektor industri, pada wilayah kecamatan Jekulo sektor industri besar telah berkembang lebih maju dibandingkan di wilayah kecamatan Mejobo. Keberadaan banyaknya industri besar di wilayah kecamatan Jekulo memberikan pengaruh yang baik dalam penyerapan tenaga kerja dan partisipasi dalam pembangunan, serta yang paling penting adalah membuktikan bahwa wilayah Kecamatan Jekulo sangat menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.

3) Prosentase jumlah penduduk kecamatan Jekulo yang berpendidikan rendah lebih sedikit dibandingkan kecamatan Mejobo yaitu (55%) untuk kecamatan Jekulo dan (75%) untuk kecamatan Mejobo, sebaliknya penduduk kecamatan Jekulo yang berpendidikan sedang lebih banyak dibandingkan kecamatan Mejobo yaitu (30%) untuk kecamatan Jekulo (21%) untuk kecamatan Mejobo, demikian pula penduduk kecamatan Jekulo yang berpendidikan tinggi lebih banyak dibandingkan kecamatan Mejobo yaitu (15%) untuk kecamatan Jekulo dan (4%) untuk kecamatan Mejobo Mata pencaharian sebagai petani dan buruh di kecamatan Jekulo (54%) lebih rendah dari Mejobo (70%) sedangkan mata pencaharian di luar petani dan buruh penduduk kecamatan Jekulo (45%) lebih besar dari Mejobo (30%). 4) Mata pencaharian sebagai petani dan buruh di kecamatan Jekulo (54%) lebih rendah dari Mejobo (70%) sedangkan mata pencaharian di luar petani dan buruh penduduk kecamatan Jekulo (45%) lebih besar dari Mejobo (30%).

Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat penulis sarankan kepada: 1) Pemerintah daerah untuk memperbanyak lapangan pekerjaan formal dan sektor bukan pertanian yang bersifat padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dari rumah tangga miskin, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. 2) Pemerintah diharapkan menurunkan biaya pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi agar anak-anak dari rumah tangga miskin dapat mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. 3) Pemerintah sebaiknya lebih bersosialisasi kepada penduduk miskin tentang KB dan program catur warga. 4) Pemerintah diharapkan memperbaiki infrastruktur yang telah rusak dan menambah infrastruktur, seperti jalan di wilayah-wilayah terpencil agar dapat memasarkan hasil produksi ke kota sehingga potensi ekonomi di daerah dapat dieksplotasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 5) Mendirikan BLK (Balai Latihan Kerja) bagi orang kurang mampu sehingga

memiliki bekal yang cukup untuk maju di dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad, Lincoln. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit BP STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Data Kependudukan Jawa Tengah*. Semarang: BPS_____.
2010. *Kudus dalam Angka*. Kudus: BPS_____.
2012. *Data Kependudukan Kudus*. Badan Pusat Statistik Bappeda Kabupaten Kudus.2007. Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kudus. Kudus: Bappeda Kudus.
- Chuang dan Lai. 2007. *Faktor-faktor Penyerapan Tenaga Kerja*. Bogor: IPB
- Criswardani Suryawati, C.2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*.[Tesis]. Universitas Diponegoro, Jawa Tengah.
- Dabukke, F.B.M. 1995. Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Pedesaan. *Skripsi Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian IPB Bogor*.
- Daromoredojo, S. K., dan Pantjar Simatupang. 2003, *Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan*, Media Ekonomi dan KeuanganIndonesia, Hal. 191 - 324, Vol. 51, No. 3.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1995, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Elhorst. 2003. *Faktor-faktor Penyerapan Tenaga Kerja*. Bogor: IPB
- Gaiha, R. 1993. *Design of Poverty Alleviation Strategy in Rural Areas*.Roma: FAO.
- Hartomo dan, Aziz. 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hermanto S., Dwi W., 2006, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Penduduk Miskin di Indonesia : Proses Pemerataan*

- dan Pemiskinan. Bogor: Direktur Kajian Ekonomi, Institusi Pertanian Bogor.
- Jekulo dalam Angka. 2012. *Profil Kecamatan Jekulo*. BPS: Kudus
- Kuncoro, Mudrajad. 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Marzuki, 2005, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Mejobo dalam Angka. 2012. *Profil Kecamatan Mejobo*. BPS: Kudus
- Mongid, A. 1990. *Gerakan Terpadu Mengatasi Kemiskinan (Gerdu Taskin)*. Menko Kesra dan Taskin (Mimeo). Jakarta: LP3S
- Octaviani, Dian. 2001, *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke*, Media Ekonomi, Hal. 100-118, Vol. 7, No. 8.
- Prsetyo, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grasindo Persada
- Ravi Dwi Wijayanto. 2010. Analisis PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. *Skripsi*.Tidak diterbitkan. Semarang: UNDIP
- Saldanha, J.1998. *Pertumbuhan Ekonomi, Survei Ekonomi Politik diIndonesia*.Analisis CSIS Studi Pembangunan Politik, Pertumbuhan dan Kerja Intelektual, 02:pp 126-151.
- Siagian, Sondang P. 1974. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung
- Soepono, Sri Saadah. 1995. *Corak dan Pola Kehidupan Sosial Ekonomi Pedesaan: Studi tentang Kewiraswastaan Pada Masyarakat di Plered*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan,
- Sudjana. 2002. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito
- Sugiyono. 2005. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumardi, M. & Evers, Hans-Dieter. 1990. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Rajawali Pers;
- Sumodiningrat, G. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: IMPAC
- Suparlan, P. 1984. *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Suryawati, C. 2005. Memahami Kemiskinan Multidimensional. *Tesis*.Tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Susesnas .2003. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemisikinan*.Jakarta: 2005.
- Tisna Deny A., 2008, *Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Indonesiatahun 2003-2004*. Kumpulan Skripsi UNDIP: Semarang.
- Todaro, Michael P, 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tulus H. Tambunan, 1997, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ustama, Dicky Djatnika. 2009. Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan.*Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*. Vo. 6, 1, Januari 2009: 1-12.
- Whisnu Adhi Saputra. 2011. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. *Skripsi*.Tidak diterbitkan. Semarang: UNDIP
- Wikipedia. 2012. Definisi Kemiskinan. Tersedia dalam <http://www.Wikipedia.htm> (online) diunduh tanggal 1 Oktober 2012.
- Winardi. 2010. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan. Tersedia dalam http://andalas_van_java_online.com (online) diunduh tanggal 2 Oktober 2012.
- World Bank. 2004. Definisi Kemiskinan. Tersedia dalam <http://www.worlbank.org>(online) diunduh tanggal 1 Oktober 2012.